

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 2,32% (yoy) pada triwulan II atau lebih rendah dibandingkan inflasi yang terjadi pada triwulan I sebesar 2,76% (yoy) dan masih berada dibawah rentang sasaran inflasi nasional, yakni $2,5 \pm 1\%$ dan juga masih dibawah angka inflasi nasional pada juni 2024 yakni sebesar 2,51%. Turunnya inflasi di Sulawesi Barat pada periode triwulan II ini lebih disebabkan karena pada bulan April dan Mei menjadi puncak masa panen sehingga stok beras di Sulawesi Barat meningkatkan dan menyebabkan penurunan harga beras dapat dilihat pada grafik inflasi Month to Month Sulawesi barat pada bulan April dan Mei 2024 mengalami deflasi sebesar 0,27% dan 0,07% namun pada bulan juni Sulawesi Barat mengalami inflasi yang terdalam yakni sebesar 0,81% hal ini disebabkan karena pada puncak panen raya berakhir pada bulan April dan bulan Juni memasuki masa tanam maka stok beras untuk wilayah Sulawesi barat menjadi berkurang dan pasokan beras lebih banyak diperoleh dari luar Sulawesi barat seperti Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan akibatnya harga beras kembali meningkat karena biaya angkut atau distribusi.

Pada Triwulan II Tahun 2024, Inflasi Sulawesi Barat lebih banyak dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, jika dilihat dari grafik diatas maka dari bulan April sampai dengan Juni 2024 kelompok makanan, minuman dan tembakau selalu mengalami peningkatan pada Bulan Juni Inflasi untuk kelompok ini mengalami peningkatan yang tajam hingga mencapai 2,07% (m-tm) dengan andil sebesar 0,79% (m-t-m) setelah sebelumnya dibulan april mengalami deflasi yakni sebesar -0,92% (m-t-m) dengan andil sebesar -0,36% (m-t-m) pada bulan April dan pada bulan Mei mengalami deflasi sebesar -0,17% (m-t-m) dengan andil sebesar -0,07% (m-t-m).

Pada Trwulan II Inflasi Sulawesi Barat banyak dipengaruhi oleh harga pangan utamanya beras, pada bulan April dan Mei penurunan harga beras dipengaruhi karena bulan April merupakan puncak panen raya selain itu pelaksanaan Subsidi Harga Beras melalui Program Fasilitasi Harga Pangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mempengaruhi penurunan harga beras di pasar, namun pada bulan Juni Inflasi disulawesi barat kembali mengalami kenaikan hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga beras karena pada bulan ini petani memulai masa tanam sehingga stok beras di Sulawesi Barat lebih banyak berasal dari luar Sulawesi Barat yakni Kabupaten Pinrang selain itu tingginya permintaan jelang HBKN yakni Idul Adha sangat mempengaruhi kenaikan harga beberapa komoditas pangan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tim Pengendali Inflasi Daerah melakukan pemetaan dan identifikasi permasalahan yang ditempuh dalam pengendalian inflasi pada periode triwulan II (April sampai dengan Juni). adapun permasalahan tersebut didasarkan pada 4 strategi pengendalian inflasi adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

Tingginya permintaan jelang Hari Besar Keagamaan yakni Idul Adha 1445 H menyebabkan penyedia jasa atau pedagang menaikkan harga apalagi ditunjang dengan kesediaan konsumen

membayar lebih tinggi untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan.

2. Ketersediaan Pasokan

Stok barang yang kurang atau tidak tersedia karena beberapa faktor seperti Beras yang stoknya berkurang untuk wilayah Sulawesi Barat karena pada bulan Juni 2024 merupakan masa tanam sehingga stok atau pasokan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan beras di Sulawesi Barat diperoleh hasil tangkapan nelayan yang semakin berkurang akibat migrasi ikan layang dan ikan cakalang menyebabkan harga ikan mengalami kenaikan.

3. Kelancaran Distribusi

Sebagian Komoditas di Sulawesi Barat masih bergantung pada wilayah luar seperti komoditas beras, cabai, bawang dan beberapa lainnya yang banyak diperoleh dari Sulawesi Selatan sehingga kendala biaya transportasi yang tinggi mempengaruhi penentuan harga pangan.

4. Komunikasi Efektif

Peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam pengendalian inflasi hal ini terbukti dengan masih rendahnya partisipasi perangkat daerah terkait dalam setiap pelaksanaan rapat koordinasi dan teknis pengendalian inflasi di Sulawesi Barat sepanjang Triwulan II (April - Juni 2024)

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejumlah upaya dilakukan oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten di wilayah Sulawesi Barat untuk menjaga stabilitas harga sejumlah bahan pokok selama triwulan II 2024. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta *stakeholders* terkait terus bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, upaya yang dilaksanakan berdasarkan 4 strategi pengendalian inflasi antara lain :

1. Keterjangkauan Harga

Dalam menjaga keterjangkauan harga sepanjang periode triwulan II 2024 di Sulawesi Barat TPID melakukan berbagai upaya diantaranya : Pemantauan Harga Harian Oleh Diskoperindag, Sidak Pasar dan Distributor ke 6 Kabupaten di Sulawesi Barat, Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 10 Kali, Intervensi Harga Ikan oleh DKP sebesar 350 Kg Ikan Layang dan 150 Kg Ikan Cakalang

2. Ketersediaan Pasokan

Dalam menjaga ketersediaan pasokan di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang periode triwulan II 2024 di Sulawesi Barat TPID melakukan upaya dalam rangka peningkatan produksi pertanian di Sulawesi Barat utamanya komoditas penyumbang inflasi seperti Beras, Ikan, cabai rawit dan Bawang Merah diantaranya : memberikan dan Menanam bibit Kacang Panjang 700 Gram, Kangkung 35 Kg, Timun 700 Gram, Bayam 700 Gram, Cabai Besar 1.000 Gram, Tomat 1.000 Gram, Cabai Rawit 1.000 Gram, Terong 700 Gram, Jagung Manis 1.000 Gram dan Bibit Itik 200 Ekor, Pembangunan tempat Pemasaran Ikan (PPI Palipi), dan Pembeberian bantuan

pupuk oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang disalurkan ke Seluruh Kabupaten yang ada Di Provinsi Sulawesi Barat seperti Fungisida, Herbisida, Insektisida, Pestisida, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair

3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi di Sulawesi Barat sepanjang periode triwulan II 2024, TPID melaksanakan upaya pemberian subsidi transportasi untuk komoditas beras dengan memberikan subsidi langsung kepada para pedagang beras yang ada di pasar Sentral (4 Pedagang) dan Regional Mamuju (6 Pedagang) dan Pasar Sentral Pakkola Majene (6 Pedagang), adapun besaran subsidi yang diberikan sebesar Rp. 1000 - Rp. 3.000,-/Kg. Total Subsidi Beras Triwulan II (April - Juni)

4. Komunikasi Efektif

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mengevaluasi kinerja TPID baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten, dilaksanakan Rapat-rapat bersama dengan seluruh TPID baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten melalui Rapat Koordinasi dan Teknis TPID dan Advokasi BPS untuk TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan berdasarkan 4 strategi inflasi antara lain :

1. Keterjangkauan Harga

Pemantauan harga harian dan sidak pasar menunjukkan upaya pengawasan yang langsung terhadap fluktuasi harga di pasar, yang penting untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan sebanyak 10 kali juga menunjukkan langkah proaktif dalam memberikan akses kepada masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau

tantangannya adalah Jumlah intervensi harga ikan mungkin belum cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan pasokan ikan di Sulawesi Barat, mengingat ikan merupakan komoditas penting dalam konsumsi masyarakat. Selain itu, frekuensi Gerakan Pangan Murah bisa lebih ditingkatkan dengan menargetkan komoditas lain yang juga berkontribusi signifikan terhadap inflasi

2. Ketersediaan Pasokan

Upaya peningkatan produksi melalui distribusi bibit pertanian dan itik merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan ketersediaan pangan jangka panjang. Penyediaan pupuk dan pembangunan tempat pemasaran ikan juga penting untuk mendukung produksi lokal yang efisien

Tantangannya adalah efektivitas program bantuan bibit dan pupuk harus dipantau secara lebih intensif untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan penggunaan yang optimal oleh petani. Meskipun ketersediaan pasokan dapat meningkat, tantangan dalam kualitas dan kuantitas komoditas pertanian tetap perlu dihadapi, terutama untuk komoditas musiman seperti cabai

dan bawang merah

3. Kelancaran Distribusi

Pemberian subsidi transportasi beras sangat efektif dalam mengurangi beban biaya distribusi, yang dapat mempengaruhi harga jual di pasar. Dengan adanya subsidi ini, harga beras di pasar lebih stabil, dan pendistribusian barang menjadi lebih lancar, khususnya untuk daerah-daerah yang lebih terpencil

Tantangannya adalah Meskipun subsidi transportasi beras membantu pedagang, perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai apakah subsidi tersebut benar-benar diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih terjangkau, atau apakah ada potensi penyimpangan dalam distribusi subsidi. Selain itu, keberlanjutan subsidi transportasi perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang

4. Komunikasi Efektif

Koordinasi yang baik antara TPID Provinsi dan Kabupaten sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi berjalan dengan konsisten dan efektif di seluruh daerah. Rapat koordinasi ini juga memperkuat jaringan informasi mengenai dinamika inflasi di setiap daerah

Tantangannya adalah komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih transparan dan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti asosiasi pedagang atau petani, untuk mendapatkan feedback yang lebih representatif mengenai kondisi pasar lokal. Penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat terkait upaya pengendalian inflasi juga dapat membantu menjaga kesadaran dan partisipasi masyarakat

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menghadapi inflasi pada Triwulan II, TPID Provinsi Sulawesi Barat telah merilis usulan atau rekomendasi kebijakan dalam rangka mengendalikan inflasi serta mengontrol ketersediaan pangan. Adapun rekomendasi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder
2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari pagu dana desa untuk pengendalian inflasi pangan.
3. Pemanfaatan teknologi digital dalam intensifikasi komoditas pertanian untuk meningkatkan kualitas dan jumlah hasil panen, serta pada sektor perikanan tangkap untuk meningkatkan efektifitas penangkapan ikan.
4. Penguatan Proses Bisnis dalam pemenuhan Kerjasama Antar Daerah (KAD) agar dapat memenuhi kebutuhan komoditas yang belum dapat terpenuhi di Sulawesi Barat
5. Intensifikasi komoditas alternatif sebagai upaya pemenuhan komoditas dengan pasokan yang masih terbatas, antara lain mendorong praktik perikanan budidaya sebagai alternative produk perikanan tangkap yang rentan terhadap musim
6. Mengoptimalkan pengawasan terhadap jalur distribusi pangan dan percepatan penyelesaian pembangunan jalur distribusi
7. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder pemangku pengendalian inflasi utamanya dalam pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi di Sulawesi

Barat